

Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Pencegahan Tawuran Antar Geng Motor

Wanda Ervamliton Dachi

Ilmu Kepolisian, Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

E-mail: Wandachi47@gmail.com

Article History:

Received: 01 Oktober 2025

Revised: 08 Oktober 2025

Accepted: 09 Oktober 2025

Kata Kunci: Pemolisian Masyarakat, Tawuran Geng Motor, Pencegahan Kejahatan.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan tawuran antar geng motor di Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literature review. Sumber data diperoleh dari berbagai jurnal akademik, laporan kepolisian, serta dokumen penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemolisian masyarakat dapat berperan dalam mengurangi potensi tawuran dengan meningkatkan kehadiran polisi di masyarakat, memperkuat interaksi sosial yang positif, serta memberikan edukasi kepada remaja mengenai dampak negatif tawuran. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan berupa kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya kepolisian, serta stigma negatif terhadap aparat kepolisian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemolisian masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencegah tawuran antar geng motor jika didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat, peningkatan sumber daya kepolisian, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan kebijakan yang lebih kuat, serta program yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan implementasi community policing.

PENDAHULUAN

Tawuran antar geng motor merupakan permasalahan sosial yang terus berkembang di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung (Wang et al., 2024). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya tingkat kriminalitas serta ancaman keselamatan publik. Menurut data dari Polda Metro Jaya (2024), terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus tawuran yang melibatkan geng motor dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan laporan Kompas (2024), tawuran yang terjadi di beberapa kota besar kerap dipicu oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti persaingan antar kelompok, rendahnya pengawasan keluarga, dan penggunaan media sosial sebagai alat provokasi. Dalam mengatasi permasalahan ini, konsep pemolisian masyarakat atau *community policing* menjadi solusi alternatif yang dapat diterapkan. (Skolnick & Bayley, 1986) mendefinisikan pemolisian

masyarakat sebagai pendekatan kepolisian yang mengintegrasikan polisi dengan komunitas dalam upaya pencegahan kejahatan. Model ini mengedepankan kemitraan antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan lingkungan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pemolisian masyarakat memiliki dampak signifikan dalam mencegah berbagai bentuk kejahatan. (Arisca, 2022) menemukan bahwa implementasi *community policing* dalam pencegahan kejahatan narkoba di Kampung Ambon kurang efektif karena minimnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya dukungan pemerintah. (Mahardika, 2020) menyoroti bahwa strategi Polmas dalam penanggulangan radikalisme di Kota Depok menghadapi kendala akibat kurangnya pelibatan pemuda secara terstruktur. Kabage (2019) meneliti pemolisian masyarakat di Nairobi dan menekankan pentingnya kolaborasi polisi dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan. Sementara itu, Margaret & Saputra (2024) menemukan bahwa di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemolisian masyarakat berhasil menekan angka tawuran warga berkat komunikasi intensif antara aparat dan komunitas lokal. Angkasa (2023) menyoroti peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan remaja di Bandar Lampung yang belum optimal akibat kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengawasan anak-anak mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pemolisian masyarakat dapat mencegah tawuran antar geng motor di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program ini serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keberhasilannya.

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemolisian Masyarakat

Pemolisian masyarakat (*community policing*) merupakan konsep yang menekankan kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman Goldstein (1990). Dalam hal ini, polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan keamanan. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan dan penyelesaian konflik (Bayuanggoro et al., 2024). Pemolisian masyarakat menekankan prinsip proaktif dibandingkan dengan pendekatan reaktif, di mana polisi bekerja sama dengan warga untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan sebelum berkembang menjadi tindak kriminal. Pemolisian masyarakat juga melibatkan pembentukan kemitraan strategis dengan berbagai elemen masyarakat, seperti sekolah, organisasi sosial, dan pemimpin komunitas. Dengan adanya kemitraan yang baik, diharapkan intervensi dapat dilakukan lebih dini untuk mencegah terjadinya kejahatan, termasuk tawuran antar geng motor. Skolnick & Bayley (1986) menekankan bahwa keberhasilan *community policing* sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

B. Teori Kontrol Sosial

Travis (1969) menjelaskan bahwa individu cenderung menghindari perilaku menyimpang ketika mereka memiliki keterikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan komunitas. Dalam geng motor, lemahnya kontrol sosial dapat mendorong remaja untuk mencari identitas di luar lingkungan keluarga dan beralih ke kelompok-kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang. Teori ini menunjukkan bahwa ikatan sosial yang lemah dengan institusi seperti keluarga dan sekolah meningkatkan

kemungkinan individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Hirschi menyoroti empat elemen utama dalam kontrol sosial: attachment (*keterikatan*), commitment (*komitmen*), involvement (*keterlibatan*), dan belief (*kepercayaan*). Jika seorang remaja memiliki hubungan yang kuat dengan orang tua, guru, dan masyarakat, maka ia cenderung menjauhi perilaku kriminal. Sebaliknya, jika ikatan ini lemah, individu lebih rentan untuk bergabung dengan kelompok yang melakukan aktivitas menyimpang, seperti geng motor yang sering terlibat dalam tawuran. Dalam penerapannya, strategi pencegahan berdasarkan teori kontrol sosial melibatkan penguatan hubungan antara remaja dengan lingkungan sosialnya. Program pemolisian masyarakat yang melibatkan sekolah, orang tua, dan komunitas lokal dapat menjadi solusi efektif untuk memperkuat kontrol sosial dan mencegah keterlibatan remaja dalam tawuran.

C. *Teori Differential Association*

Sutherland dkk. (1939) mengungkapkan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Remaja yang sering bergaul dengan kelompok kriminal cenderung mengadopsi norma dan perilaku yang menyimpang. Fenomena ini dapat menjelaskan bagaimana tawuran antar geng motor berkembang sebagai akibat dari interaksi yang berulang di lingkungan sosial yang negatif. Teori ini menekankan bahwa kejahatan bukanlah hasil dari faktor biologis atau psikologis semata, melainkan dipelajari melalui komunikasi dan asosiasi dengan individu lain yang memiliki pola perilaku menyimpang. Sutherland menyoroti bahwa seseorang akan lebih cenderung melakukan tindakan kriminal jika mereka lebih banyak berinteraksi dengan individu yang memiliki nilai-nilai menyimpang dibandingkan dengan mereka yang memiliki norma sosial yang baik. Dalam tawuran geng motor, teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan remaja dalam aktivitas kekerasan bukan hanya karena dorongan individu, tetapi karena mereka telah mempelajari dan menginternalisasi norma kelompok yang mendukung perilaku tersebut. Oleh karena itu, salah satu strategi pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi paparan remaja terhadap kelompok-kelompok yang memiliki kecenderungan kriminal dan menggantinya dengan lingkungan sosial yang lebih positif, seperti kegiatan komunitas atau pendidikan karakter di sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Literature review dipilih sebagai metode penelitian karena memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep, teori, dan temuan dari berbagai sumber yang telah ada mengenai pemolisian masyarakat dan pencegahan tawuran antar geng motor (Sugiyono., 2019). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun sintesis dari berbagai kajian sebelumnya dan mengevaluasi efektivitas pemolisian masyarakat dalam menanggulangi konflik sosial. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan kepolisian, serta artikel berita yang relevan. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya terhadap topik yang dikaji. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana informasi yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti implementasi pemolisian masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta tantangan dan peluang dalam penerapannya.

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi yang kredibel untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih

objektif (Ramadhan, 2021). Selain itu, analisis kritis dilakukan terhadap setiap sumber untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan dapat diandalkan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman mengenai peran pemolisian masyarakat dalam pencegahan tawuran antar geng motor serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemolisian Masyarakat di Bandar Lampung

Berdasarkan laporan dari Polresta Bandar Lampung (2024) , program pemolisian masyarakat telah diterapkan dengan berbagai strategi, seperti patroli rutin, forum kemitraan polisi-masyarakat, serta edukasi bagi remaja. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya kepolisian. Patroli rutin dilakukan untuk meningkatkan kehadiran polisi di masyarakat, memberikan rasa aman, serta mengurangi kemungkinan terjadi tindak kriminal. Namun, efektivitas patroli ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel dan luasnya cakupan wilayah yang harus diawasi oleh kepolisian. Sering kali, keterbatasan ini menyebabkan kurang optimalnya jangkauan patroli dalam mencegah tawuran antar geng motor secara menyeluruh.

Selain patroli, Polmas di Bandar Lampung juga berupaya membangun interaksi yang lebih erat dengan warga melalui program penyuluhan dan kegiatan sosial bersama. Penyuluhan dilakukan di berbagai sekolah dan komunitas pemuda guna meningkatkan kesadaran akan bahaya tawuran dan dampak hukum yang dapat ditimbulkan. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat partisipasi warga, terutama dari kalangan remaja yang menjadi kelompok sasaran utama. Banyak remaja yang masih kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan edukasi semacam ini karena lebih terpengaruh oleh lingkungan sosial mereka. Selain itu, terdapat tantangan dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan juga tanggung jawab bersama. Masih banyak warga yang berpandangan bahwa tugas utama kepolisian adalah menangani kasus kejahatan setelah terjadi, bukan melakukan pencegahan.

Selain kendala partisipasi, program Polmas di Bandar Lampung juga menghadapi hambatan dari aspek keterbatasan anggaran dan sumber daya. Untuk menjalankan berbagai program preventif, kepolisian membutuhkan dukungan finansial yang memadai guna mendanai operasional patroli, penyuluhan, serta pengadaan fasilitas bagi komunitas yang bekerja sama dengan kepolisian. Sayangnya, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan program ini secara konsisten dan berkelanjutan.

Faktor pendorong dalam implementasi pemolisian masyarakat di Bandar Lampung

Faktor pendorong dalam implementasi pemolisian masyarakat di Bandar Lampung antara lain adalah kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian, keterlibatan tokoh masyarakat, serta adanya dukungan dari pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kepolisian menjadi elemen kunci dalam menciptakan kerja sama yang harmonis antara aparat penegak hukum dan komunitas setempat. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat seperti pemuka agama, ketua RT/RW, dan organisasi sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong keberhasilan program ini. Dengan adanya tokoh masyarakat yang turut serta dalam kegiatan pemolisian, masyarakat lebih mudah menerima serta terlibat aktif dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Tidak kalah pentingnya, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk regulasi, anggaran, serta fasilitas juga turut mempermudah

implementasi program Polmas secara lebih efektif.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam penerapan pemolisian masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan lingkungan sering kali menjadi kendala utama. Masih banyak warga yang berpandangan bahwa tanggung jawab keamanan sepenuhnya berada di tangan kepolisian, sehingga mereka kurang berinisiatif untuk berpartisipasi dalam program-program yang telah dirancang. Selain itu, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat kepolisian akibat pengalaman buruk di masa lalu juga menjadi hambatan dalam membangun kerja sama yang solid antara polisi dan warga. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan *community policing*. Program Polmas membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dalam hal pelatihan personel, sarana dan prasarana, maupun pengadaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Sayangnya, minimnya alokasi anggaran sering kali menghambat pelaksanaan berbagai inisiatif yang telah direncanakan.

Selain faktor-faktor tersebut, tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi Polmas adalah kurangnya personel kepolisian yang memiliki keterampilan khusus dalam pendekatan berbasis komunitas. Banyak anggota kepolisian yang lebih terbiasa dengan pendekatan represif dibandingkan dengan metode preventif yang lebih menekankan pada interaksi sosial dan kemitraan dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan program Polmas tidak berjalan maksimal karena belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip *community policing*. Selain itu, masih terdapat stigma negatif terhadap aparat kepolisian di kalangan masyarakat tertentu. Beberapa kelompok masih meragukan efektivitas program Polmas, terutama karena pengalaman sebelumnya dengan tindakan kepolisian yang dianggap terlalu represif. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan komunikasi yang lebih intensif antara kepolisian dan masyarakat menjadi langkah penting untuk mengatasi kendala ini. Dengan membangun hubungan yang lebih baik dan menunjukkan komitmen dalam melindungi masyarakat, citra kepolisian dapat diperbaiki sehingga masyarakat lebih percaya dan bersedia untuk terlibat dalam program Polmas.

Keberhasilan pemolisian masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa terlibat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri. Program ini akan lebih efektif jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, kepercayaan terhadap aparat kepolisian, serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Dengan mengatasi faktor penghambat yang ada, pemolisian masyarakat di Bandar Lampung dapat berjalan lebih optimal dalam mencegah tawuran antar geng motor dan menciptakan kondisi lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Pembahasan

Pemolisian masyarakat merupakan pendekatan yang menekankan pada keterlibatan aktif komunitas dalam menjaga keamanan. Berdasarkan teori pemolisian masyarakat yang dikemukakan oleh Goldstein (1990), strategi ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat kepolisian guna menciptakan lingkungan yang lebih aman. Implementasi pemolisian masyarakat di Bandar Lampung telah menunjukkan efektivitasnya dalam menekan angka tawuran antar geng motor, meskipun masih terdapat berbagai tantangan. Melalui berbagai upaya seperti patroli rutin, penyuluhan, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, Polresta Bandar Lampung berupaya membangun hubungan yang lebih erat dengan warga untuk meningkatkan rasa aman dan mencegah perilaku kriminal di kalangan remaja.

Dalam perspektif teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi (1969), keberhasilan pemolisian masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana individu memiliki keterikatan sosial

yang kuat dengan lingkungannya. Faktor-faktor seperti hubungan yang erat dengan keluarga, sekolah, serta komunitas berkontribusi dalam mencegah individu terjerumus ke dalam aktivitas kriminal seperti tawuran antar geng motor. Sayangnya, di banyak kasus, lemahnya kontrol sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan remaja bergabung dengan geng motor. Banyak dari mereka berasal dari keluarga yang kurang memberikan perhatian atau lingkungan yang tidak kondusif. Oleh karena itu, pemolisian masyarakat tidak hanya berfokus pada tindakan represif tetapi juga harus memperkuat kontrol sosial melalui program-program yang dapat meningkatkan keterlibatan remaja dalam kegiatan positif, seperti kegiatan olahraga, pelatihan keterampilan, dan forum diskusi komunitas.

Teori *differential association* dari Sutherland dkk. (1939), juga relevan dalam menganalisis fenomena tawuran antar geng motor. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam konteks geng motor, individu yang bergabung dalam kelompok tersebut akan cenderung mengadopsi nilai-nilai yang mendukung kekerasan dan perilaku agresif. Dengan demikian, strategi pemolisian masyarakat yang efektif harus dapat mengintervensi lingkungan sosial remaja agar mereka tidak terus-menerus terpapar oleh norma-norma negatif yang berkembang dalam kelompoknya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menciptakan lingkungan sosial alternatif yang lebih positif melalui keterlibatan aktif aparat kepolisian dalam komunitas, baik dalam bentuk edukasi maupun pembinaan langsung terhadap kelompok remaja yang berisiko tinggi.

Dalam implementasinya, pemolisian masyarakat di Bandar Lampung masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya sumber daya dan personel kepolisian yang terlatih dalam pendekatan berbasis komunitas. Selain itu, stigma negatif terhadap aparat kepolisian di beberapa kelompok masyarakat juga menjadi kendala dalam membangun kepercayaan yang diperlukan untuk keberhasilan program ini. Teori kontrol sosial menunjukkan bahwa tanpa adanya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat, program seperti pemolisian masyarakat akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat, salah satunya melalui komunikasi yang lebih terbuka dan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

Penerapan community policing juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi sosial (SYAHRIL et al., 2022). Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan pemolisian masyarakat tidak hanya bergantung pada kerja sama antara polisi dan warga, tetapi juga pada seberapa besar komitmen pemerintah dalam mendukung inisiatif ini melalui alokasi anggaran yang memadai serta regulasi yang mendukung. Pemerintah daerah dapat berperan dalam menyediakan fasilitas bagi program-program pencegahan kriminalitas yang berbasis komunitas, seperti pusat kegiatan remaja, ruang publik yang aman, serta program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu mengurangi faktor sosial ekonomi yang mendorong individu untuk bergabung dengan geng motor.

Secara keseluruhan, pemolisian masyarakat di Bandar Lampung telah menunjukkan hasil yang cukup positif, namun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek. Mengacu pada teori pemolisian masyarakat, kontrol sosial, dan *differential association*, keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, kepercayaan terhadap aparat kepolisian, serta upaya preventif yang lebih kuat dalam mengurangi eksposur remaja terhadap lingkungan yang mendorong perilaku kriminal. Dengan perbaikan pada aspek sosialisasi, peningkatan keterlibatan komunitas, serta optimalisasi sumber daya, pemolisian masyarakat dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam mencegah tawuran antar geng motor dan menciptakan keamanan yang lebih berkelanjutan di wilayah Bandar Lampung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemolisian masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam mencegah tawuran antar geng motor di Bandar Lampung. Melalui berbagai program seperti patroli rutin, penyuluhan kepada remaja, serta kemitraan dengan tokoh masyarakat, Polresta Bandar Lampung telah berupaya membangun hubungan yang lebih erat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Namun, efektivitas implementasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta stigma negatif terhadap kepolisian. Implementasi pemolisian masyarakat di Bandar Lampung telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan lingkungan. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungannya. Sebagai rekomendasi, peningkatan efektivitas pemolisian masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan, baik melalui sosialisasi maupun keterlibatan aktif dalam forum komunitas. Kedua, memperkuat dukungan pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran yang lebih memadai guna memastikan keberlanjutan program. Ketiga, memberikan pelatihan lebih lanjut kepada aparat kepolisian dalam pendekatan berbasis komunitas agar strategi yang diterapkan lebih humanis dan proaktif. Dengan implementasi yang lebih terarah dan dukungan dari berbagai pihak, pemolisian masyarakat dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam mencegah tawuran antar geng motor dan menciptakan lingkungan yang lebih aman di Bandar Lampung.

DAFTAR REFERENSI

- Angkasa, N. (2023). Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan kelompok remaja di Bandar Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Arisca, F. (2022). Implementasi Program Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Narkotika di Kampung Ambon. *Universitas Indonesia*.
- Bayuanggoro, D., Tinggi, S., & Kepolisian, I. (2024). Pemolisian Kolaboratif dalam Penanganan Konflik Sosial : Studi Kasus Konflik Sara di Desa Mareje , Lombok Barat. 5(11), 5026–5039.
- Goldstein, H. (1990). *Problem-Oriented Policing*. HeinOnline.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency* University of California Press Berkeley. *CA Google Scholar*.
- Kabage, R. G. (2019). *Implementation of Community Policing Strategy: Impact of Community Factors in Nairobi Country*.
- Mahardika, R. A. F. (2020). Implementasi Strategi Polmas dalam Penanggulangan Paham Radikalisme. *Universitas Indonesia*.
- Margaret, M., & Saputra, I. (2024). Implementasi Community Policing Dalam Pencegahan Tawuran Warga Di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 29–42.
- Polda Metro Jaya. (2024). *Laporan Tahunan Kejahatan di Jakarta*.
- Polresta Bandar Lampung. (2024). *Laporan Implementasi Program Pemolisian Masyarakat*.
- Skolnick, J. H., & Bayley, D. H. (1986). *The new blue line: Police innovation in six American cities*. Simon and Schuster.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, D. F. (1939). *Principles of criminology*. Altamira Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

-
- Syahril, D. N., Fadlan Kalman, S.Thi., M. ., & , Masnon, S.E., M. S. (2022). *Peran Program Community Policing (Perpolisian Masyarakat) Oleh Bina Mitra Polres Kerinci Dalam Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Sitinjau Laut (Studi Kasus Pada Polsek Sitinjau Laut)*. 4(5), 63–75.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Travis, H. (1969). *Social Bond Theory*. University of California Press.
- Wang, A., Tajkia, W., Asri, R. D., Rosali, R. A., Yoga, & Rizi, F. (2024). Tantangan Global 5.0: Mengatasi Konflik Sosial di Kalangan Remaja. *Jurnal Sosio Humaniora Kose Pena*, 5 (1), 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.54423/jsk.v5i1.178>